

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azgari, Aidul Fitriciada, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Gilissent, John, dan Gorlé, Frits, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar (Terjemahan Freddy Tengker)*, Refika Aditama, Bandung
- Gunawan, Jamil, *et. al.*, 2005, *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta
- Huda, Ni'Matul, 2015 *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Malang
- Maddick, Hendry, dan Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Maschab, Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta
- Ndraha, Talizidudu, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum*. Setara Press, Malang
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., dan Haruni, Catur, W., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1983, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983*, Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung

Soenardjo, Unang, 1984, *Tinjauan singkat: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.

Sukriono, Didik, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press kerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Malang

Wignosubroto, Soetandyo, *et. al.*, 2005, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Intitute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta

B. JURNAL

Arfa'I, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan", *INOVATIF*, Vol. 6, No. 7, 2013

Fatah, Abdul, *et.al.*, "ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA", *Jurnal Dialektika*, Vol. 4, No. 1, Februari, 2019

Khoiriah, Siti, *et. al.*, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 1, Januari, 2017,

Kushandjani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa", *Yustisia*, Vol. 4, No. 2, Mei – Agustus, 2015.

Kushandjani, "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Imiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2016.

Zainudin, Arief, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, September, 2016.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Angkianata, Yongky Putut, 2015, *Perubahan Kewenangan Pemerintahan Desa di Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Intan, Nur, 2017, *Kewenangan desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

MZ, Zen Zenibar, 2003, Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Provinsi Sumatera Selatan, *Disertasi*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta,

Puspitasari, Dyahayu, 2015, Kewenangan Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember.

D. INTERNET

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, “Rekapitulasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi Seluruh Indonesia”, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/5.-REKAPITULASI-KODE-DAN-DATA-WILAYAH-BERDASARKAN-PMDN-72-TAHUN-2019.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, “Zaman Penjajahan Jepang”, <https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil/sejarah/75-zaman>

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143)

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2779)

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 56, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3153)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implikasi Pengaturan Kewenangan Desa dalam Rezim Pengaturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa

NADIA SUCI DWITASARI, Faiz Rahman, S.H., L.LM.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>